

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adnan Buyung Nasuiton, *Arus Pemikiran Konstitusionalisme : Tata Negara* (Jakarta : Kata Penerbit, 2007).
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006).
- Anton Bekker, *Metode – Metode Filsafat* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986).
- Arifin Abdullah, *Kajian Yuridis Sumber-Sumber Hukum (Studi Normatif)*, (Banda Aceh : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021).
- Basrowi dan Sukidin, *Metode Penelitian Kualitatif Prepektif Mikro* (Surabaya : Insan Cendekia, 2002).
- Dahlan Thaib, *ketatanegaraan Indonesia prespektif konstitusional* (Yogyakarta : Total Media, 2009).
- Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum* (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2018).
- Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, *Revisi Buku Pedoman Penulisan Tesis Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum* (Aceh Utara : Universtas Malikussaleh, 2019).
- G.J Wolhoff, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta : Timun Mas, 1960).
- Hans kelsen, *General Theory Of Law And State*, Translate By Anders Wedberg (New York : Russel & Russel, 1973).
- International Commission of jurists, “*The Dynamic Aspects Of The Rule Of Law In The Modern Age*” dalam Mariam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 2009).
- Irawan Soejito, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. (Jakarta : Bina Aksara, 1981).
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta : Rajawali Pers, 2014).
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006).
- Kacung Marijan, *Sistem Politik Di Indonesia : Konsolidasi Demokrasi Pada Masa Orde Baru*, (Jakarta : Kencana, 2012).
- Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan (2) (Proses Dan Teknik Pembentukannya)* (Yogyakarta : Kanisius, 2007).
- Mariam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 2009).
- Marini, *Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019: Keadilan dan kesetaraan Bagi Peserta Pemilu Kasus Partai Lokal di Aceh*. (Jakarta : Bawaslu, 2019).

- Mukhlis Taib, *Dinamika Perundang-Undangan di Indonesia* (Bandung : Refika Aditama, 2017).
- Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2012).
- Rachmat Trijono, *Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan*, (Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2013).
- Rahmat Bagja dan Dayanto “*Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu*” (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2021).
- Radian Syam, *Pengawasan Pemilu ; Konsep, Dinamika dan Upaya Kedepan Untuk Mewujudkan Pemilu Yang Demokratis Dan Berkualitas* (Depok : Rajawali Buana Pustaka, 2020).
- Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1992).
- Ramlan Surbakti, dkk, *Perekayasaan Sistem Pemilu Untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis* (Jakarta : Kemitraan, 2008).
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika 1993).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen* (Bandung : Alfabeta, 2014).
- Sujamto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*. (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986).
- Sutrisno Hadi, *Metodelogi Riset* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001).
- Topo Santoso dan Ida Budhiati, *Pemilu Di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan dan Pengawasan* (Jakarta; Sinar Grafika, 2019).
- W.J.S.Peorwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2005).

B. Peraturan Perundang-Undangan.

- Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia, *Undang-Undang Pemerintahan Aceh*, UU Nomor 11 Tahun 2006. LN No.62 Tahun 2006. TLN No.4633, Ps.235.
- Indonesia, *Undang-Undang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*, UU Nomor 10 Tahun 2008. LN No.51 Tahun 2008, TLN No.4836, Ps.54.
- Indonesia, *Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, UU Nomor 12 Tahun 2011, LN No.82 Tahun 2011, TLN No.5234, Ps.7.
- Indonesia, *Undang-Undang Perubahan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, UU Nomor 13 Tahun 2022, LN No.143, TLN No.6801, Ps.9.

- Indonesia, *Undang-Undang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*, UU Nomor 8 Tahun 2012, LN No. 117 Tahun 2012, TLN NO.5316, Ps.54.
- Indonesia, *Undang-Undang Pemilihan Umum*, UU Nomor 7 Tahun 2017, LN No. 182 Tahun 2017, TLN No. 6109, Ps.244.
- Pemerintah Aceh, *Qanun tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota*, Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008, LD No. 03 tahun 2008, Ps.17
- KPU, *Peraturan tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota*, Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023, Ps.8.
- KPU, *Peraturan tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota*, Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, Ps.6.
- KPU, *Peraturan tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota*, Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013, Ps.11.
- KPU, *Keputusan KPU Nomor 325 Tahun 2023 tentang pedoman teknis pengajuan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupate/ Kota*.
- KIP, *Putusan KIP Aceh Nomor 5 Tahun 2013 pengajuan Bakal Calon Anggota DPRA, DPRK dari Partai Politik dan Partai Politik Lokal*.
- KPU, *Surat KPU Nomor : 608/PL.01.4-SD/06/KPU/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018 perihal Syarat Calon Anggota DPR Aceh dan DPR Kabupaten/ Kota yang ditujukan kepada ketua KIP Kabupaten/ Kota di wilayah Aceh*.
- KPU, *Surat DPRA Nomor 160/1506 tanggal 2 Juli 2018 perihal Pendapat DPR Aceh tentang Kuota Caleg DPRA/DPRK di Provinsi Aceh*.
- KPU, *Surat KPU Nomor 646/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 tanggal 9 Juli 2018 perihal Penjelasan Jumlah Pengajuan Calon Anggota DPRA dan DPRK*
- KPU, *Surat Surat KPU Nomor 674/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 tanggal 9 Juli 2018 perihal Penjelasan Jumlah Pengajuan Bakal calon Anggota DPRA dan DPRK*.

C. Jurnal dan Tesis.

- Dinia, M.F. *Urgensi Pengawasan Preventif terhadap Qanun No. 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh*. (Jurnal Hukum Ius QuiaIustum, Vol. 21(1), 2014).
- Nurlaina, *Motif aktor Lokal Dalam Kuota Pencalonan 120 % Partai Politik Lokal Pada Pemilu 2019 di Provinsi Aceh*, (Tesis Magister Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatra Utara. Medan,2020).
- Jimly Asshiddiqie, *Partai Politik Dan Pemilu Sebagai Instrumen Demokrasi*. (Jurnal Konstitusi, volume 3, No.4, 2006)
- Ramlan Surbakti, *Urgensi Kodifikasi UU Pemilu*, artikel diakses pada tanggal 21 Februari 2020 dari Ria Casmi Arrsa, *Pemilu Serentak Dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi*. (Jurnal Konstitusi, volume11, No,3 September 2014, pp.515-537).
- Sariyulis, *Analisis Kedudukan dan Kewenangan Bawaslu Terhadap Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Dalam Pelaksanaan Quasi Peradilan Di Bawaslu Provinsi Aceh*, (Tesis Magister Hukum Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, 2021).

D. Internet

- <https://aceh.tribunnews.com/2018/07/11/kpu-dinilai-diskriminatif-parnas-di-aceh-tolak-surat-terkait-kuota-120-%> Diakses pada tanggal 19 Februari 2022.
- <https://aceh.tribunnews.com/2018/06/25/soal-calon-legislatif-100-%-ketua-komisi-i-dpra-kpu-tidak-boleh-bonsai-kekhususan-aceh> Diakses pada tanggal 19 Februari 2022.
- <https://aceh.tribunnews.com/2018/06/25/ini-penjelasan-kpu-terkait-syarat-kuota-caleg-dpradprk-100-%?page=all> Diakses pada tanggal 19 Februari 2022.
- <https://aceh.tribunnews.com/2013/04/19/pemilu-di-aceh-alami-dualisme-regulasi> diakses pada tanggal 19 Februari 2022.
- <https://aceh.tribunnews.com/2018/06/25/soal-calon-legislatif-100-%-ketua-komisi-i-dpra-kpu-tidak-boleh-bonsai-kekhususan-aceh> diakses pada tanggal 19 Februari 2022.
- <https://maglearning.id/2022/04/12/pengertian-dasar-hukum-dan-contohnya/> Diakses pada tanggal 19 Oktober 2023.